



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN



Jalan Urip Sumoharjo No. 55 Pekalongan
Telepon/Faximile (0285) 4410393
Post-el : dpmppa.pekalongankota@gmail.com
Laman: dpmppa.pekalongankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga (Nama Perangkat Daerah) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategi dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dibiayai dari APBD/APBN Kota Pekalongan. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Rencana Strategi dan Rencana Kerja. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Demikian kami berharap bahwa LKjIP ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kota Pekalongan. Selanjutnya LKjIP ini dapat dijadikan acuan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Pekalongan, 20 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuandan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan



PUJI WINARTI, SKM, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP 19700502 199501 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan pada tahun 2024 memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan total 4 (empat) indikator kinerja, dan 4 (empat) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 83,35.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebesar 82,75 dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 99,28%;

2. Indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat target yang ditetapkan 9,02%.

Berdasarkan penghitungan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024 bahwa anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan 9,51%. Sehingga capaian

untuk indikator Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat sebesar 105,43%;

3. Indikator Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG target yang ditetapkan 28.56.

Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG adalah indikator yang bersumber dari BPS, capaian kinerja indikator Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG belum tersedia (*na*), menunggu rilis dari BPS;

4. Indikator Skor Kota Layak Anak target yang ditetapkan 769,8.

Indikator Skor Kota Layak Anak adalah indikator berdasarkan hasil evaluasi Kota Layak Anak oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Capaian kinerja indikator ini belum tersedia (*na*), hal ini disebabkan penyesuaian dengan jadwal yang ditetapkan dengan Kementerian PPPA RI.

Kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 6.402.183.800,00 atau 92,89% dari total pagu anggaran sebesar Rp 6.892.868.000,00.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongandiharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 KONDISI APARATUR.....	5
1.3.1 SUMBER DAYA MANUSIA.....	5
1.3.2 SARANA DAN PRASARANA.....	6
1.4 ISU STRATEGIS.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026.....	10
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026...	16
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	21
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	25
3.2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	25
3.2.2 CAPAIAN KINERJA TUJUAN.....	27
3.2.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	28
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	65
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH.....	71
3.5 INOVASI.....	72
BAB IV PENUTUP.....	73
LAMPIRAN	
Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 – 2026	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

1	Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
2	Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan	5
3	Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
4	Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Non ASN	6
5	Tabel 1.5	Jumlah Sarana dan Prasarana DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2024 (Gedung dan Kendaraan Bermotor)	7
6	Tabel 1.6	Jumlah Aset Peralatan Kantor DPMPPA Tahun 2024	7
7	Tabel 2.1	Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024	12
8	Tabel 2.2	Target Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	13
9	Tabel 2.3	Target Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	17
10	Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2024	18
11	Tabel 3.1	Pengukuran dengan Skala Ordinal	24
11	Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024	25
12	Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	26
13	Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2026	27
14	Tabel 3.5	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan (Nama Perangkat Daerah) Tahun 2024	27
15	Tabel 3.6	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	28
16	Tabel 3.7	Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024)	29
17	Tabel 3.8	Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	29
18	Tabel 3.9	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2	36
19	Tabel 3.10	Anggaran Dana Kelurahan Bersumber dari APBD untuk Kegiatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Swadaya Masyarakat	37
20	Tabel 3.11	Hasil Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (Epdeskel) Kota Pekalongan Tahun 2024	42
21	Tabel 3.12	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3	39
22	Tabel 3.13	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome	51
23	Tabel 3.14	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4	54
24	Tabel 3.15	Kategori Kota Layak Anak (KLA)	55

25	Tabel 3.16	Perbandingan Kategori Kota Layak Anak dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2024	56
26	Tabel 3.17	Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli Partisipasi" (PUSPAGA "ELPePar")	59
27	Tabel 3.18	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024	65

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan	4
2	Gambar 3.1	Persentase Swadaya Masyarakat Kota Pekalongan	37
3	Gambar 3.2	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan	45
4	Gambar 3.3	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan dibandingkan dengan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional	46
5	Gambar 3.4	Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender	54
6	Gambar 3.5	Skor Kota Layak Anak Kota Pekalongan	56
7	Gambar 3.6	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	61

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah dan melaksanakan tugas sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan yang telah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan

dan Anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sekretariat;
- f. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- g. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan

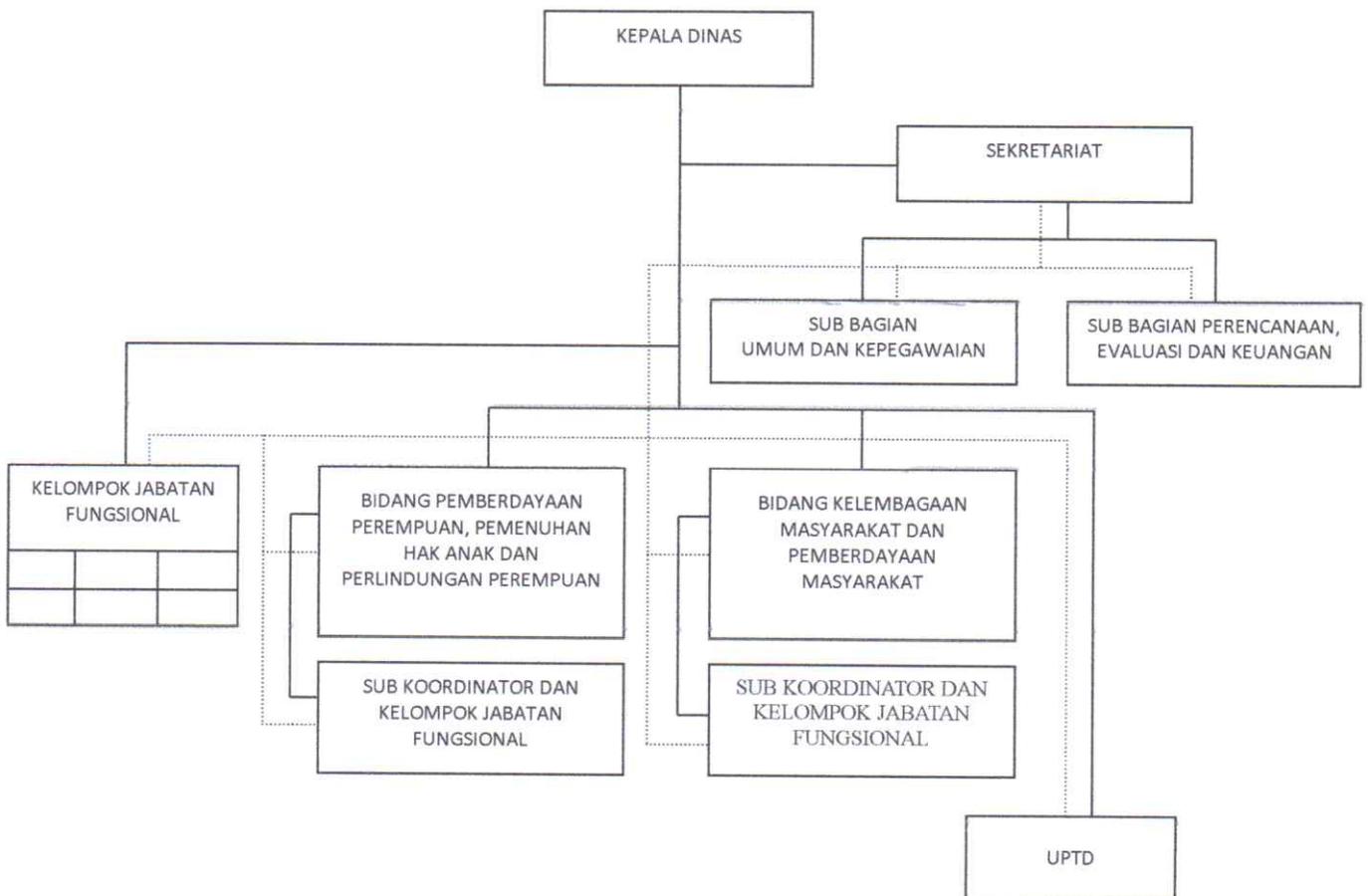
Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Kelompok Jabatan Fungsional

f. UPTD

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2024

Gambar 1.1: Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan

1.3 KONDISI APARATUR

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sangat didukung oleh keberadaan sumber daya yang terdiri dari pegawai maupun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

1.3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

a. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terhitung per 31 Desember 2024, jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah 18(delapan belas) orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SD	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-
3	SMA Sederajat	4	-	4
4	D3	-	1	1
5	S1	-	10	10
6	S2	-	3	3
	Jumlah	4	14	18

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Jenjang Kepangkatan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	3	1	4
3	Golongan III	-	11	11
4	Golongan IV	-	3	3
	Jumlah	3	15	18

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jenjang Kepangkatan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III A	-	1	1
3	Eselon III B	-	2	2
4	Eselon IV A	-	2	2
5	Jabatan Fungsional	-	4	4
6	Jabatan Pelaksana	3	5	8
	Jumlah	3	15	18

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

b. Non ASN

Terhitung per 31 Desember 2024, jumlah non ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah 15 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Pegawai Non ASN

No	Non ASN	L	P	Jumlah
1	Teknikal Asisten Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
2	Full timer LPPAR	-	1	1
3	Tenaga Kegiatan	3	5	8
4	Tenaga Kebersihan	2	-	2
5	Penjaga Malam	2	-	2
6	Pengemudi	1	-	1
	Jumlah	9	6	15

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

1.3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana utama pendukung pelaksanaan tupoksi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, antara lain terdiri dari gedung, kendaraan dinas dan sarana

kerja lainnya, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 1.5, sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana
DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2024
(Gedung dan Kendaraan Bermotor)

No.	Jenis Aset	Volume
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1000 m2
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	504 m2
3	Station Wagon (Kendaraan Bermotor Roda 4)	4 unit
4	Sepeda Motor (Kendaraan Bermotor Roda 2)	12 unit

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Tabel 1.6
Jumlah Aset Peralatan Kantor
DPMPPA Tahun 2024

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Stationary Water Pump	1 unit
2	A.C. Window	13 unit
3	Alat Dapur Lainnya	9 buah
4	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2 buah
5	Brandkas	1 buah
6	Dispenser	6 buah
7	Facsimile	1 buah
8	Filing Cabinet Besi	4 buah
9	Gordyin/Kray	12 buah
10	Handy Cam	2 buah
11	Intercom Unit	1 buah
12	Jam Elektronik	4 buah
13	Kipas Angin	1 buah
14	Kompur Gas (Alat Dapur)	5 buah
15	Kursi Besi/Metal	2 buah
16	Kursi Fiber Glas/Plastik	11 buah
17	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	27 buah
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 buah
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 buah
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11 buah

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
21	Kursi Putar	5 buah
22	Kursi Rapat	46 buah
23	Kursi Tamu	3 set
24	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2 buah
25	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1 unit
26	Lemari Besi/Metal	6 buah
27	Lemari Kayu	2 buah
28	Lemari Katalog	1 buah
29	Lemari Sorok	2 buah
30	Lemari Kaca	2 buah
31	Papan Visual/Papan Nama	1 buah
32	Mesin Absensi	2 buah
33	Papan Nama Instansi	6 buah
34	Meja Kerja Kayu	4 buah
35	Meja Rapat	1 buah
36	Tempat Tidur Besi	2 buah
37	Meja Resepsionis	1 buah
38	Meja Tambahan	2 buah
39	Meja Makan Besi	1 buah
40	Meja Komputer	1 buah
41	Tikar	1 buah
42	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 buah
43	Mesin Pemotong Rumput	1 buah
44	Lemari Es	2 buah
45	Tabung Gas	2 buah
46	Sound System	1 buah
47	Megaphone	2 buah
48	Microphone	2 buah
49	Tustel	2 buah
50	Tiang Bendera	2 buah
51	Tangga Aluminium	1 buah
52	Mimbar/Podium	1 buah
53	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 buah
54	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 buah
55	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	17 buah
56	Proyektor + Attachment	1 buah
57	Telephone (PABX)	1 buah
58	Thermometer Badan	3 buah

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
59	Infrared Thermometer	1 buah
60	P.C Unit	13 unit
61	Lap Top	12 unit
62	Note Book	4 unit
63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25 unit
64	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit
65	Modem	1 buah
66	Papan Pengumuman	2 buah
67	CCTV	1 unit
68	Penghancur Kertas	1 unit
	JUMLAH	312

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

1.4 ISU STRATEGIS

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu strategis berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

- a. Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak;
- c. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Belum optimalnya kinerja organisasi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk

menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2024
Visi : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-7 : 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government		
Tujuan Kota : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	73,69 indeks
Tujuan DPMPPA 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,45 indeks
Sasaran DPMPPA 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83,35 indeks
Program DPMPPA 1.1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen
Kegiatan DPMPPA 1.1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00 Persen
Kegiatan DPMPPA 1.1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100,00 Persen
Program DPMPPA 1.1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen
Kegiatan DPMPPA 1.1 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00 Persen
Kegiatan DPMPPA 1.1: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100,00 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2024
Kegiatan DPMPPA 1.1 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 Persen
Program DPMPPA 1.1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen
Kegiatan DPMPPA 1.1 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 persen
Sasaran DPMPPA 1.2 : Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	9,02 persen
Program DPMPPA 1.2 : Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	66,67 Persen
Kegiatan DPMPPA 1.2 : Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan	11,11 Persen
Program DPMPPA 1.2 : Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	85,51 Persen
Kegiatan DPMPPA 1.2: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100,00 Persen
Program DPMPPA 1.2 : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,68 Persen
Kegiatan DPMPPA 1.2 : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100,00 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2024
Misi - 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan		
Tujuan Kota : Meningkatkan Kualitas SDM yang Religius, Kompeten dan Produktif	Indeks Pembangunan Manusia	75,31 Indeks
Tujuan DPMPPA 2 : Optimalisasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31 Indeks
Sasaran DPMPPA 2.1 : Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	28,56 Indeks
Program DPMPPA 2.1 : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	7,39 persen
Kegiatan DPMPPA 2.1 : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	16,67 persen
Kegiatan DPMPPA 2.1 : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	26,67 Persen
Kegiatan DPMPPA 2.1 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100,00 persen
Program DPMPPA 2.1 : Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15,01 Persen
Kegiatan DPMPPA 2.1 : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100,00 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2024
Kegiatan DPMPPA 2.1 : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	100,00 Persen
Tujuan DPMPPA 3 : Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Nindya Kategori
Sasaran DPMPPA 3.1: :Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	769,80 Skor
Program DPMPPA 3.1: Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	40,74 Persen
Kegiatan DPMPPA 3.1: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak yang aktif	28,13 Persen
Program DPMPPA 3.1: Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 Persen
Kegiatan DPMPPA 3.1: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100,00 Persen
Kegiatan DPMPPA 3.1: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)	100,00 Persen
Kegiatan DPMPPA 3.1: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100,00 Persen

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Target Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Inspektorat Daerah
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	Anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dibagi Dana Kelurahan (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dikali 100	Kelurahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Tahun N yang dilakukan oleh BPS	BPS
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Skor	Skor Kota Layak Anak Tahun N yang dilakukan oleh KPPA RI	KPPA RI

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Target Sasaran Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	80,50	82,00	83,50	83,35	83,45	83,55
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	7,61	8,08	8,55	9,02	9,49	10,00
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28,50	28,51	28,51	28,56	28,56	28,56
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Skor	626,00	628,00	630,00	769,80	769,90	769,90

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,45 indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31 indeks	Formulasi : Release dari BPS Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS
3.	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Formulasi : Kategori penghargaan hasil evaluasi Kab/Kota Layak Anak pada tahun n yang diberikan oleh Kementerian PPPA Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kementerian

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
				PPA
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83,35 indeks	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	9,02 persen	Formulasi : (Anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dibagi Dana kelurahan (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan) x 100 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPMPPA
3.	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	28,56 indeks	Formulasi : Persentase sumbangan pendapatan perempuan pada tahun n (hasil rilis BPS) Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : BPS
4.	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	769,8 skor	Formulasi : Skor KLA hasil evaluasi Kemen PPPA RI Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : Kemen PPPA RI

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.274.204.000,00	APBD-P
2 Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 1.678.947.000,00	APBD-P

3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	56.020.000,00	APBD-P
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.172.277.000,00	APBD-P
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	275.000.000,00	APBD-P
6	Program Perlindungan Perempuan	Rp	81.308.000,00	APBD-P
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	277.022.000,00	APBD-P
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	78.090.000,00	APBD-P
	Jumlah	Rp	6.892.868.000,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk:

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**
Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- **Pengawasan Kerja**
Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut:

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (Nama Perangkat Daerah) Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	83,35	82,75	99,28	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	persen	9,02	9,51	105,43	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG	indeks	28,56	na	na	na
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	skor	769,80	na	na	na
Rata-rata Capaian						02,36	Sangat Berhasil

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 (dua) target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 (nol) target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 (dua) target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 102,36 % dengan kategori Sangat Berhasil.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	81,77	82,75	83,35	82,75	▼
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	persen	6,28	17,09	8,45	9,51	▲
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG	indeks	28,21	28,04	28,56	na	na
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	skor	602,00	637,60	769,80	na	na

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	82,75	83,55	99,04	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	persen	9,51	10,00	95,10	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG	indeks	na	28,56	na	na
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	skor	na	769,90	na	na

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	95,45	98,13	102,81	Sangat Berhasil
2	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	65,31	na	na	na
3	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	kategori	Nindya	na	na	na

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 1 (satu) target;

- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 (nol) target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 (dua) target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 102,81% dengan kategori Sangat Berhasil.

3.2.3 Analisa Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Nilai SAKIP OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai SAKIP OPD	78,63	Indeks	82,75	83,35	83,35	82,75	99,28	83,55

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan memperoleh nilai 82,75 atau predikat "A". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	21,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	82,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

Tabel 3.8 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

Nilai SAKIP DPMPPA Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan, dapat dilihat pada gambar 3.7, sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2024
1	PROVINSI JAWA TENGAH	82,63
2	KOTA PEKALONGAN	73,02
3	BAPPEDA	88,50
4	DINKOMINFO	83,40
5	DLH	85,45
6	DINDAGKOP & UMKM	85,75
7	INSPEKTORAT	84,60
8	DPU PR	81,25
9	BPKAD	84,50
10	DPMPPA	82,75
11	DKP	83,25
12	BKPSDM	83,20
13	DINDUKCAPIL	82,90

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2024
14	DINKES	83,20
15	SETDA	81,50
16	DINDIK	78,45
17	DINPARBUDPORA	77,55
18	DPMPTSP	77,90
19	DINAS PERHUBUNGAN	77,15
20	DINPERPA	76,10
21	KEC. PEKALONGAN SELATAN	77,00
22	DINARPUS	75,45
23	KEC. PEKALONGAN BARAT	76,15
24	KEC. PEKALONGAN UTARA	76,10
25	KEC. PEKALONGAN TIMUR	76,25
26	BPBD	75,45
27	DINPERINAHER	75,45
28	DINSOSP2KB	75,90
29	DINPERKIM	74,75
30	SATPOL-P3KB	74,25
31	SEKRETARIAT DPRD	75,15
32	KESBANGPOL	73,45

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
3. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.391.926.000	3.274.204.000	2.934.865.181	89,64
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.762.000	15.762.000	15.757.800	99,97
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.204.000	2.204.000	2.200.000	99,82
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.558.000	1.558.000	1.558.000	100,00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	11.999.800	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.744.615.000	2.593.541.000	2.301.541.384	88,74
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.421.000	2.552.347.000	2.260.372.484	88,56
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.750.000	39.750.000	39.725.000	99,94
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.444.000	1.444.000	1.443.900	99,99
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.601.000	254.953.000	247.139.232	96,94
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.730.000	1.730.000	1.730.000	100,00
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.155.000	76.507.000	68.815.000	89,95
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,00
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.636.000	30.636.000	30.610.000	99,92

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	2.476.000	99,04
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.780.000	134.780.000	134.708.232	99,95
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.948.000	268.948.000	235.300.835	87,49
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	2.100.000	87,50
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.200.000	106.200.000	75.283.199	70,89
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.348.000	160.348.000	157.917.636	98,48
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.000.000	36.000.000	30.125.930	95,68
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.960.000	71.960.000	67.785.000	94,20
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	50.000.000	48.400.930	96,80
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.040.000	14.040.000	13.940.000	99,29
	Jumlah	3.391.926.000	3.274.204.000	2.934.865.181	89,64

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 89,64%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 99,28%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,76%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu indikator persentase ketersediaan laporan capaian kinerja, indikator persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan indikator persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah.

a) Indikator Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja

Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta pengadministrasian keuangan perangkat daerah melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Indikator program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut ::

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karenadengan terlaksananya baik perencanaan, penganggaran, maupun evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel, melalui 3 (tiga) sub kegiatan, dengan terlaksananya :
 - ✓ Penyusunan dokumen renja dan perubahan renja, 2 (dua) dokumen;
 - ✓ Penyusunan dokumen RKA dan perubahan RKA, 2 (dua) dokumen;
 - ✓ Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah, 4 (empat) dokumen;
 - ✓ Penyusunan dokumen evaluasi renja, 4 (empat) dokumen;

- ✓ Penyusunan dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan), 2 (dua) dokumen; dan
- ✓ Penyusunan dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 4 laporan pemantauan RTP).
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena terlaksananya pengelolaan keuangan yang tertib, akurat dan akuntabel, melalui 3 (tiga) sub kegiatan, dengan terlaksananya :
 - ✓ Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, 12 (dua belas) bulan;
 - ✓ Penyediaan jasa administrasi keuangan, 12 (dua belas) bulan; dan
 - ✓ Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, 1 (satu) dokumen.

b) Indikator Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian

Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Indikator program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

- Administrasi kepegawaian perangkat daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena keikutsertaan pada event tingkat kota;
- Administrasi umum perangkat daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena terlaksananya administrasi umum

perangkat daerah, melalui 8 (delapan) sub kegiatan, dengan terlaksananya:

- ✓ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - ✓ Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos;
 - ✓ Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
 - ✓ Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - ✓ Penyediaan makanan dan minuman;
 - ✓ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - ✓ Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - ✓ Fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, melalui 3 (tiga) sub kegiatan, dengan terlaksananya:
- ✓ Penyediaan jasa surat menyurat;
 - ✓ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; dan
 - ✓ Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihankantor.

c) Indikator Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Indikator program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator

Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara rutin, melalui 3 (tiga) sub kegiatan, dengan terlaksananya:

- ✓ Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala;
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
- ✓ Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala.

SASARAN 2 :Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat

Capaian indikator sasaran Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	7,14	Persen	17,09	8,45	9,02	9,51	105,43	10,00

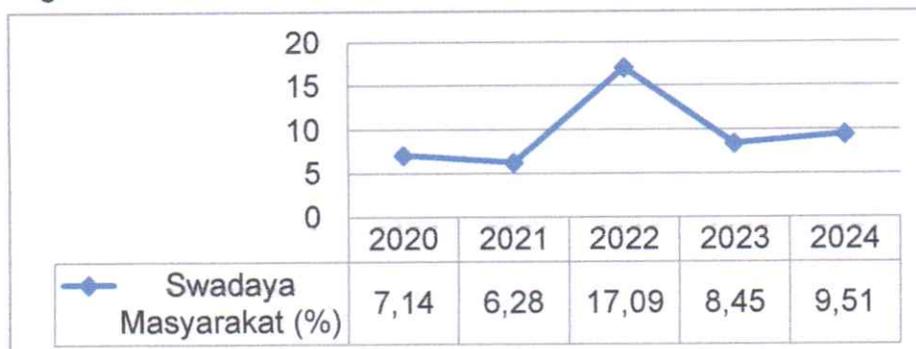
Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Indikator Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat diukur dengan membandingkan anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dengan dana kelurahan yang bersumber dari APBD yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan.

Tahun 2024 target indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat adalah 9,02% realisasi 9,51%, sehingga capaian kinerjanya adalah 105,45% atau kategori sangat berhasil.

Capaian Indikator Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat, dapat dilihat pada Gambar 3.6 dan tabel 3.1, sebagai berikut:



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Gambar 3.1: Persentase Swadaya Masyarakat Kota Pekalongan

Tabel 3.10
Anggaran Dana Kelurahan Bersumber dari APBD untuk Kegiatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Swadaya Masyarakat

Tahun	Jumlah Kelurahan	Jumlah Anggaran (Rp)	Swadaya Masyarakat (Rp)	Prosentase (%)
2020	17	839.724.500	59.935.400	7.14
2021	27	4.332.379.400	272.125.750	6.28
2022	27	2.217.366.000	378.970.906	17.09
2023	27	4.005.082.000	338.567.000	8,45
2024	27	2.792.043.000	265.579.100	9,51

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Dari table tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 swadaya masyarakat meningkat 1,06% atau Rp 72.989.900.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

- Adanya sosialisasi pra kegiatan berupa sosialisasi tentang pentingnya budaya gotong-royong/partisipasi masyarakat kepada warga di lokasi kegiatan sebelum pelaksanaan pembangunan.

- b. Adanya gotong royong/partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan melalui musrenbang tingkat basis, keterlibatan dalam proses pelaksanaan pembangunan termasuk pengawasan oleh masyarakat sendiri;
- c. Pelaksanaan kegiatan dengan swakelola masyarakat yakni proses pelaksanaan pembangunan menggunakan mekanisme swakelola kepada kelompok masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sehingga lebih mudah untuk menggerakkan masyarakat untuk berswadaya;
- d. Adanya pendampingan dalam identifikasi potensi swadaya masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan;
- e. Transparansi kegiatan yaitu adanya papan proyek yang dipasang di sekitar lokasi kegiatan berikut kontak pengaduannya.

Tantangan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Aktifitas masyarakat yang berbeda-beda sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan;
2. Terdapat program dana kelurahan yang tidak dilaksanakan secara langsung bersama dengan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat kurang optimal.

Berikut adalah program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Peningkatan Kerjasama Desa	610.284.000	1.678.947.000	1.642.741.000	97,84
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	610.284.000	1.678.947.000	1.642.741.000	97,84
	1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	610.284.000	1.678.947.000	1.642.741.000	97,84
II	Program Administrasi Pemerintahan Desa	48.520.000	56.020.000	54.159.900	96,68
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	48.520.000	56.020.000	54.159.900	96,68

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	1 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	48.520.000	56.020.000	54.159.900	96,68
III	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.102.029.000	1.172.277.000	1.126.914.957	96,13
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.102.029.000	1.172.277.000	1.126.914.957	96,13
	1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	177.827.000	175.043.000	165.809.632	94,73
	2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	327.136.000	337.136.000	327.522.862	97,15
	3 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	75.000.000	67.500.000	53.113.000	78,69
	4 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	52.500.000	46.932.000	46.856.000	99,84
	5 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	469.566.000	545.666.000	533.613.463	97,79
	Jumlah	1.760.833.000	2.907.244.000	2.823.815.857	97,13

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97,13%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 105,43%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,55%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa.

Program ini diukur dengan Indikator Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan. Target untuk indikator program ini adalah 66,67% dan realisasi 72,22% sehingga capaiannya 108,33%. Indikator program ini tercapai karena adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan serta stakeholder dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan Jumlah kumulatif kelurahan yang difasilitasi pembangunan sarprasnya oleh TNI sampai dengan tahun n dengan jumlah target kelurahan yang terfasilitasi selama periode renstra. Fasilitas kerja sama TNI dan kelurahan yang dimaksud adalah fasilitas kegiatan TMMD.

Fasilitas kegiatan TMMD selama periode renstra ditargetkan 18 (delapan belas) kelurahan, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah terfasilitasi 13 (tiga belas) kelurahan yaitu Kelurahan Poncol, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Banyurip di tahun 2021, tahun 2022 dialokasikan Kelurahan Tirto, Kelurahan Poncol, Kelurahan Kuripan Yosorejo, tahun 2023 dialokasikan di Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Gamer, Kelurahan Podosugih dan tahun 2024 dialokasikan di Kelurahan Sokoduwet, Kelurahan Tirto, Kelurahan Degayu dan Kelurahan Klego.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa. Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja persentase fasilitas kerja sama TNI dan Kelurahan dengan target 11,11% realisasi 14,81% sehingga capaiannya 133,35%. Indikator ini tercapai karena adanya kerja sama yang baik antara

Pemerintah, TNI dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, dalam bentuk fasilitasi kegiatan TMMD Sengkuyung I, II, III dan IV berupa pembangunan fisik dan non fisik dialokasikan di 4 (empat) kelurahan dari 27 (dua puluh tujuh) kelurahan di Kota Pekalongan yaitu Kelurahan Sokoduwet, Kelurahan Tirto, Kelurahan Degayu dan Kelurahan Klego serta Karya Bakti TNI di Kelurahan Jenggot.

2) **Program Administrasi Pemerintahan Desa.**

Program ini diukur dengan Indikator Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang" . Target untuk indikator program ini adalah 85,51% dan realisasi 88,89% sehingga capaiannya 103,95%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari pemerintah untuk memenuhi kelengkapan administrasi kelurahan dan sarana prasarana umum di wilayah kelurahan serta melakukan evaluasi secara berkala melalui aplikasi Epdeskel dan prodeskel. Dari evaluasi tersebut diperoleh hasil 24 (dua puluh empat) kelurahan dengan kriteria cepat berkembang dan 3 (tiga) kelurahan dengan kriteria berkembang.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kinerja administrasi kelurahan dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya sinergitas dengan stakeholder terkait dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, dalam bentuk evaluasi perkembangan kelurahan dan lomba kelurahan. Hasil evaluasi perkembangan kelurahan tingkat provinsi dapat dilihat pada Tabel.....

Tabel 3.11 Hasil Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (Epdeskel)
Kota Pekalongan Tahun 2024

Kecamatan	No	Kelurahan	Tingkat Perkembangan
Pekalongan Barat	1	MEDONO	Cepat Berkembang
	2	PODOSUGIH	Cepat Berkembang
	3	SAPURO KEBULEN	Cepat Berkembang
	4	BENDAN KERGON	Cepat Berkembang
	5	PASIRKRATONKRAMAT	Cepat Berkembang
	6	TIRTO	Cepat Berkembang
	7	PRINGREJO	Cepat Berkembang
Pekalongan Timur	8	NOYONTAANSARI	Cepat Berkembang
	9	KAUMAN	Cepat Berkembang
	10	PONCOL	Cepat Berkembang
	11	KLEGO	Cepat Berkembang
	12	GAMER	Berkembang
	13	SETONO	Cepat Berkembang
	14	KALI BAROS	Cepat Berkembang
Pekalongan Utara	15	KRAPYAK	Cepat Berkembang
	16	KANDANG PANJANG	Berkembang
	17	PANJANG WETAN	Cepat Berkembang
	18	PADUKUHAN KRATON	Cepat Berkembang
	19	DEGAYU	Cepat Berkembang
	20	BANDENGAN	Cepat Berkembang
	21	PANJANG BARU	Berkembang
Pekalongan Selatan	22	BANYURIP	Cepat Berkembang
	23	BUARAN KRADENAN	Cepat Berkembang
	24	JENGGOT	Cepat Berkembang
	25	KURIPAN KERTOHARJO	Cepat Berkembang
	26	KURIPAN YOSOREJO	Cepat Berkembang
	27	SOKODUWET	Cepat Berkembang

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, diolah

3) **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.**

Program ini diukur dengan indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Target untuk indikator ini 97,68% realisasi 97,68% sehingga capaiannya 100%.

Indikator program ini tercapai karena adanya sinergitas stakeholder terkait dan motivasi yang kuat dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

Tahun 2024 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sejumlah 2.153 LKK terdiri dari 27 LPM, 27 BKM, 341 RW, 1693 RT, 32 PKK, 1 Posyandu Kota, 31 pokja posyandu dan 1 karang taruna kota, dibandingkan tahun 2022 jumlah LKK bertambah 31 LKK yang semula berjumlah 2.118 LKK, penambahan terdapat pada Pokja Posyandu. Dari 2.122 LKK terdapat 2.103 LKK yang aktif bertambah 31 LKK yang aktif dibandingkan tahun sebelumnya.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya sinergitas stakeholder terkait dan motivasi yang kuat dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

dukungan dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :

- Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, berupa penyusunan dokumen pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan dokumen monitoring dan evaluasi RWT.
- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,

dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, berupa :

- ✓ Capacity building TP PKK;
- ✓ Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pokjanaan dan pokja posyandu;
- ✓ Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas karang taruna.
- Sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, berupa lomba teknologi tepat guna (TTG). Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Pekalongan terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu Kategori Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan dan Kategori Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG), dengan pemenang sebagai berikut:
 - ✓ Kategori Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan:
 - Juara 1 : Mesin Pembatikan Otomatis oleh M Suropto dri Kelurahan Pringrejo
 - Juara 2 Alat Pemecah Kacang Otomatis oleh Sutoyo dri Kelurahan Kuripan Kertoharjo),
 - ✓ Kategori Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG):
 - Juara 1 : Flight Time Drone (Baterai Eksternal Drone) oleh Eko Presdianto dri Kelurahan Pasir Kraton Kramat
 - Juara 2 : Alat Penyulingan sampah dg metode Pirolisis oleh Mochamad Yusuf dari Kelurahan Kauman);
- Sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, berupa Lomba Video BBGRM pada bulan Mei 2024 dan kegiatan puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, berupa pelaksanaan kegiatan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK.

SASARAN 3 :Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan

Capaian indikator sasaran Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG adalah sebagai berikut :

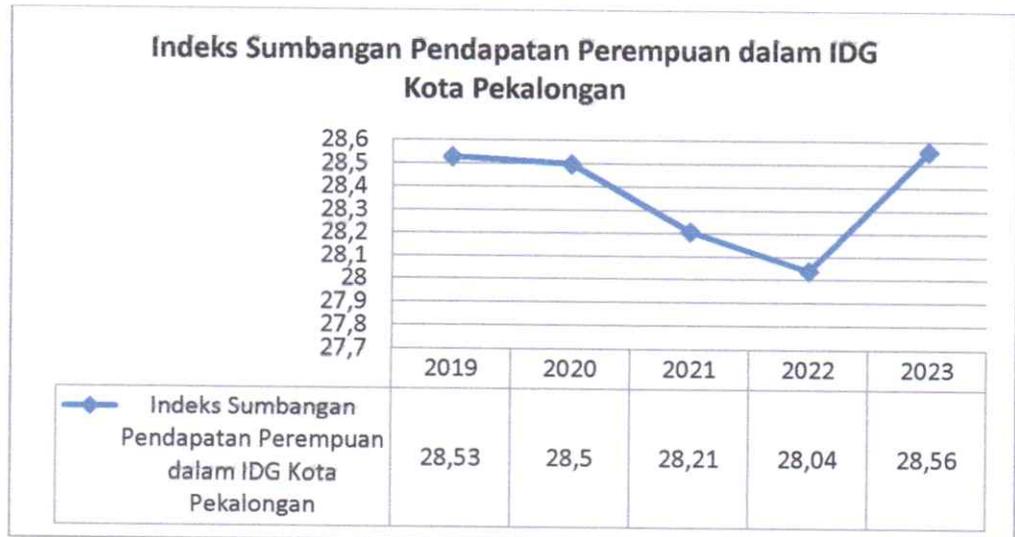
Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG	28,5	Persen	28,04	28,56	28,56	na	na	28,56

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Indikator kinerja Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG diukur berdasarkan angka Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG yang dikeluarkan atau bersumber dari BPS, Sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG adalah indeks yang digunakan untuk mengukur persamaan perempuan dan laki-laki peran perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Tahun 2023 Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan mengalami kenaikan setelah menurun akibat pandemi covid, dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut :



Sumber : BPS rilis, 2024

Gambar 3.2: Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan

Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut:



Sumber : BPS rilis, 2024

Gambar 3.3: Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan dibandingkan dengan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Dukungan dari Pemimpin Daerah, DPRD, dan Ketua TP PKK Kota Pekalongan dalam upaya optimalisasi pengarusutamaan gender;
2. Potensi masyarakat untuk menjadi bagian dalam upaya peningkatan IDG cukup besar khususnya dari sisi SDM (lembaga/organisasi kemasyarakatan, RT/RW, organisasi perempuan, Forum Anak, Karang Taruna, PKK, LPM, BKM, Lebe, dan dunia usaha);
3. Sinergitas dan kolaborasi antar lembaga dan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan cukup baik dalam mensinergikan program optimalisasi pengarusutamaan gender

Tantangan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Budaya patriarki cukup besar di Kota Pekalongan sehingga untuk membangun paradigma responsif gender membutuhkan usaha yang intens dan membutuhkan waktu;
2. Masih terdapat tokoh agama/tokoh masyarakat yang belum sejalan dengan upaya optimalisasi pengarusutamaan gender.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	275.000.000	275.000.000	257.036.300	93,47
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	34.221.500	97,78
	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	35.000.000	35.000.000	34.221.500	97,78
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	220.000.000	220.000.000	202.814.800	92,19
	1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	220.000.000	220.000.000	202.814.800	92,19
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00
	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00
II	Program Perlindungan Perempuan	81.308.000	81.308.000	67.487.862	83,00
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	20.000.000	20.000.000	19.302.000	96,51
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	19.302.000	96,51

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	61.308.000	61.308.000	48.185.862	78,60
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.308.000	61.308.000	48.185.862	78,60
	Jumlah	356.308.000	356.308.000	324.524.162	91,08

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 91,08%. Sedangkan capaian kinerja indikator kinerja sasaran masih *na*, sehingga belum dapat menghitung efisiensi penggunaan sumber daya. Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 2 (dua) program,5 (lima) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender adalah indikator yang diukur dengan membandingkan Jumlah akumulasi sub kegiatan yang responsif gender pada tahun-n dengan target seluruh sub kegiatan yang akan di responsifkan gender selama periode 5 tahun (dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026). Target untuk indikator ini adalah 7,39% dan realisasi 19,15% sehingga capaiannya 259,14%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen semua stakeholder dalam perwujudan kesetaraan gender.

Sampai dengan tahun 2024, sub kegiatan yang telah diresponsifkan gender adalah 19,15%, sebagai berikut :

Uraian	Tahun				Jumlah
	2021	2022	2023	2024	
Jumlah sub kegiatan yang responsif gender	81	84	93	62	320
Jumlah total sub kegiatan	1.671	1.303	1.343	1.355	1.671
Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender					19,15

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan dengan indikator kinerja persentase sub kegiatan yang responsif yaitu dengan membandingkan jumlah sub kegiatan yang renponsif gender pada tahun n dengantarget sub kegiatan yang akan diresponsifkan gender sampai dengan tahun 2026 sebanyak 372 sub kegiatan yaitu 2 sub kegiatan dari tiap OPD setiap tahunnya.

Target indikator ini 16,67% realisasi 16.67% sehingga capaiannya 100% yaitu 62 sub kegiatan yang responsive gender. Indikator ini dapat terealisasi karena adanya komitmen OPD.

Dalam mewujudkan ketercapaian kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, didukung oleh sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota, berupa penyusunan dokumen PPRG dalam bentuk penyusunan GAP (*Gander Analisis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*) untuk sub kegiatan yang berbeda setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh 30 (tiga puluh) perangkat daerah.

b) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan dengan indikator persentase organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/advokasi pemberdayaan perempuan adalah indikator kinerja yaitu dengan membandingkan jumlah organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan yang dilatih dengan jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan.

Target indikator ini 26,67% realisasi 26,67% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai adanya komitmen antar stakeholder sehingga sampai dengan tahun 2024 telah terlatih 8 (delapan) organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan dari total keseluruhan Organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan Kota Pekalongan sebanyak 30 (tiga puluh) Lembaga. Ke 8 (delapan) organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan tersebut adalah Nasyiatul 'Aisyiyah dan Fatayat NU (tahun 2021), Bhayangkari dan Persit (tahun 2022), Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) (tahun 2023), dan tahun 2024 Muslimat NU dan GWKP (Gabungan Wanita Kristen Pekalongan).

Dalam mewujudkan ketercapaian kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota, didukung oleh sub kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, berupa :

- ✓ kegiatan advokasi PUG sebanyak 2 kali ;
- ✓ Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) kali;

c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita adalah indikator kinerja yaitu

dengan membandingkan jumlah DWP yang melaksanakan kegiatan dengan jumlah seluruh dharma wanita yang ada. Target indikator ini 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya komitmen dari seluruh DWP unit dan pelaksana yang ada di Kota Pekalongan untuk meningkatkan program kerja dalam mewujudkan Indonesia emas 2045.

Dalam mewujudkan ketercapaian kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota, didukung oleh sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota, berupa :

- Rakor DWP Kota Pekalongan dan unit pelaksana; dan
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan DWP secara berkala.

2) Program Perlindungan Perempuan

Program ini diukur dengan indikator rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) adalah indikator yang diukur dengan membandingkan Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan seratus ribu. Target indikator ini 15,01 realisasi 18,46 sehingga capaiannya 81,31%. Capaian kinerja ini terkait dengan kasus yang dilaporkan di LP-PAR sehingga tidak dapat ditarget dan diprediksi.

Tabel 3.13 Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perempuan Korban Kekerasan	27	12	38	17	21
2	Jumlah Penduduk Perempuan	112,540	112,654	114,879	113.245	113.772
3	Rasio per 100.000	23.99	10.65	33.08	15.01	18,46

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Tabel Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Usia Korban Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Korban Kekerasan	2.110	2.257	2.207	2.338	2.420
Korban Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin :					
• Laki – laki	436	390	289	469	464
✓ Anak	332	307	245	413	412
✓ Dewasa	104	83	44	56	52
• Perempuan	1.674	1.867	1.918	1.869	1.956
✓ Anak	865	922	979	914	937
✓ Dewasa	809	945	939	955	1.019
Korban Kekerasan berdasarkan Kelompok Umur :					
• Anak	1.197	1.229	1.224	1.327	1.349
• Dewasa	913	1.028	983	1.011	1.071

Sumber: kekerasan.kemempapa.go.id | Rekap: 16 Januari 2025

Sumber : <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>

Grafik Korban Kekerasan Perempuan Nasional Berdasarkan Provinsi Tahun 2024



Sumber : <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota adalah indikator kinerja yaitu dengan membandingkan jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan target kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Target indikator ini 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator kegiatan ini tercapai karena adanya komitmen stakeholder dalam program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, berupa :

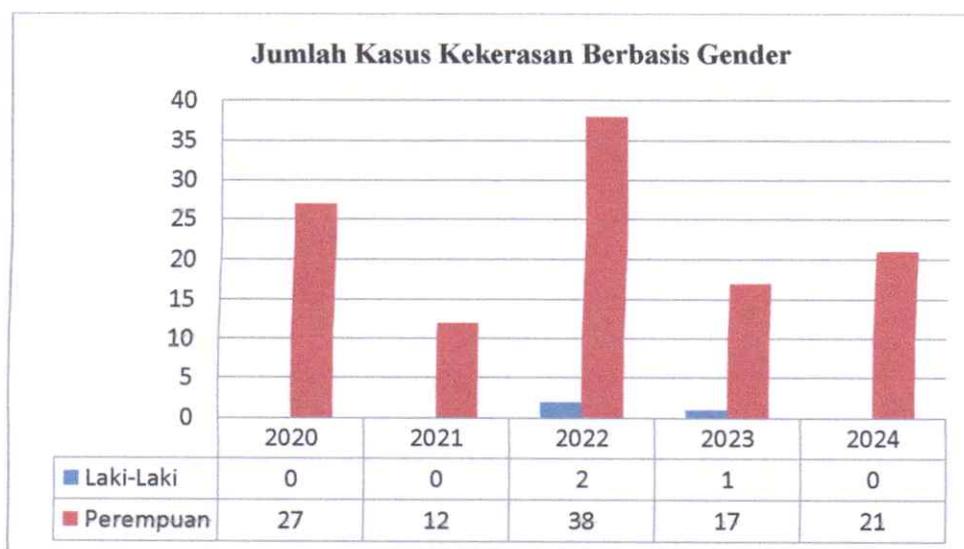
- ✓ Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak terdiri dari perwakilan Aisyiyah, Nashiyatul Aisyiyah, Fatayat NU dan Muslimat NU sebanyak 1 kali;
- ✓ Kegiatan Rakor PPA TENTANG mekanisme pelayanan kasus kekerasan sebanyak 1 kali;
- ✓ Kegiatan Rakor PUSPAGA sebanyak 7 kali;
- ✓ Kegiatan Visitasi Pembentukan UPTD PPA Kota Pekalongan sebanyak 1 kali.

b) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output) yaitu dengan membandingkan Jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani dengan jumlah kasus kekerasan pada perempuan yang masuk ke LPPAR. Target indikator ini 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator kegiatan ini tercapai karena adanya komitmen stakeholder dalam kegiatan pelayanan

pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, melalui layanan pengaduan kekerasan sebanyak 107 layanan, terdiri dari :

- ✓ Case conference kasus perempuan sebanyak 36 layanan;
- ✓ Pendampingan kasus kekerasan sebanyak 71 layanan.



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Gambar 3.4: Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender

SASARAN 4 : Meningkatnya Skor Kota Layak Anak

Capaian indikator sasaran Skor Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

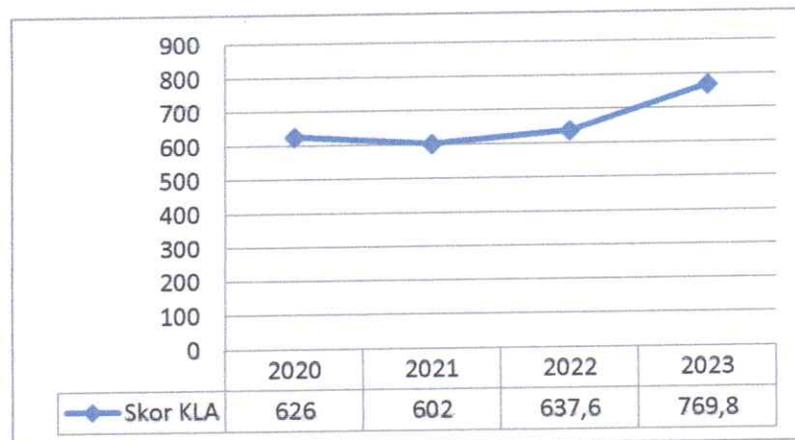
No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Skor Kota Layak Anak	626	Skor	628,00	769,80	769,80	na	na	769,90

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Indikator sasaran ini diukur berdasarkan skor yang diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI tentang Kota Layak Anak. Target indikator ini 769.80 realisasi *na* sehingga capaiannya masih *na*.

Hal ini disebabkan penyesuaian dengan jadwal yang ditetapkan dengan Kementerian PPPA RI.

Tahun 2023, Kota Pekalongan dalam mewujudkan Kota Layak Anak telah diapresiasi oleh Kementerian PPPA RI berupa penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Nindya meningkat dari tahun sebelumnya dengan kategori Madya. Peningkatan kategori dari Madya ke Nindya tidak terlepas dari komitmen bersama Walikota Pekalongan dengan OPD terkait dan stakeholder dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai Kota Layak Anak. Skor Kota Layak Anak Kota Pekalongan, dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut:



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah
Gambar 3.5 : Skor Kota Layak Anak Kota Pekalongan

Tabel 3.15 Kategori Kota Layak Anak (KLA)

No	Kategori	Rentang Nilai
1	Pratama	500-600
2	Madya	601-700
3	Nindya	701-800
4	Utama	801-900
5	KLA	901-1000

Tabel 3.16 Perbandingan Kategori Kota Layak Anak dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Daerah	Kategori
1.	Kabupaten Brebes	Nindya
2.	Kabupaten Batang	Madya
3.	Kabupaten Pemalang	Nindya
4.	Kabupaten Tegal	Nindya
5.	Kota Tegal	Nindya
6.	Kota Pekalongan	Nindya

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Dukungan dari Pemimpin Daerah (Walikota dan Wakil Walikota), DPRD , Ketua TP PKK Kota Pekalongan dalam upaya optimalisasi pengarusutamaan Hak Anak di Kota Pekalongan cukup tinggi;
2. Potensi masyarakat untuk menjadi bagian dalam upaya mewujudkan Kota Pekalongan Menuju Layak Anak cukup besar;
3. Kolaborasi dan sinergi lembaga/instansi terkait dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di klaster KLA cukup baik.

Tantangan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Indikator-indikator di tiap kluster Kota Layak Anak dengan cakupan yang sangat luas dan harus terstandarisasi;
2. Adanya perubahan sumber daya manusia baik dikarenakan mutasi atau pergantian personil tim Kota Layak Anak;
3. Peran dunia usaha belum optimal.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	277.022.000	277.022.000	270.460.900	97,63
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	277.022.000	277.022.000	270.460.900	97,63
	1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	124.841.000	124.841.000	122.231.000	97,91
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.291.000	113.291.000	111.094.900	98,06
	3 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.890.000	38.890.000	37.135.000	95,49
II	Program Perlindungan Khusus Anak	78.090.000	78.090.000	48.517.700	62,13
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12.300.000	12.300.000	11.650.000	94,72
	1 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota Layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	12.300.000	12.300.000	11.650.000	94,72
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.468.000	57.468.000	28.547.000	49,67
	1 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	57.468.000	57.468.000	28.547.000	49,67
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.322.000	8.322.000	8.320.700	99,98

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten / Kota	8.322.000	8.322.000	8.320.700	99,98
Jumlah		355.112.000	355.112.000	318.978.600	89,82

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 89,82%. Sedangkan capaian kinerja indikator kinerja sasaran masih *na*, sehingga belum dapat menghitung efisiensi penggunaan sumber daya.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 2 (dua) program 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, sebagai berikut:

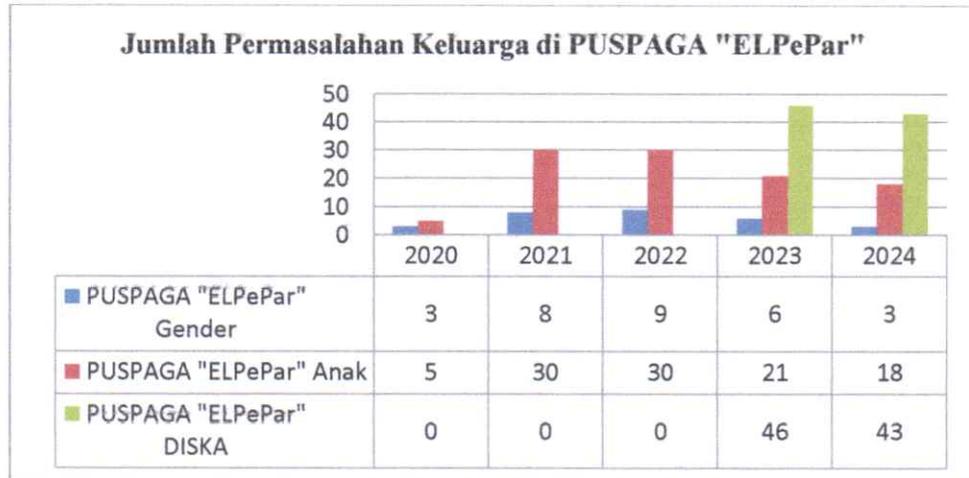
1) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diukur dengan indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) yaitu dengan membandingkan jumlah akumulasi kelurahan yang mengikuti evaluasi dekela dengan jumlah kelurahan yang ada. Target 2024 40,74% realisasi 40,74% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen stakeholder untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak dalam semua aspek kehidupan. Sampai dengan tahun 2024 telah ditetapkan 11 (sebelas) kelurahan layak anak yaitu Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Podosugih, Pringrejo, Kelurahan Nayontaansari, Kelurahan Kalibaros dan Kelurahan Banyurip (tahun 2020), Kelurahan Jenggot (tahun 2021), Kelurahan Klego (tahun 2022), Kelurahan Tirto (tahun 2023), Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Medono (tahun 2024).

Kegiatan unggulan dalam program ini adalah Kegiatan Kota Layak Anak (KLA) dan Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli Partisipasi" (PUSPAGA "ELPePar") yang bertujuan sebagai unit layanan terpadu satu pintu (one stop service) masalah keluarga dan anak.

Layanan dalam PUSPAGA terdiri dari:

- Layanan konsultasi permasalahan pengasuhan anak dan keluarga;
- Pemberian layanan psikoedukasi;
- Layanan konsultasi permasalahan psikologi awal; dan
- Memberikan pembekalan persiapan pernikahan bagi anak dan pemohon dispensasi kawin bersama dengan beberapa stakeholder.



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, diolah

Tabel 3.17 Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli Partisipasi" (PUSPAGA "ELPePar")

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
PUSPAGA GENDER	3	8	9	6	3
Laki-laki	-	-	-	3	-
Perempuan	3	8	9	3	3
PUSPAGA ANAK	5	30	30	21	18
Laki-laki	2	14	10	8	10
Perempuan	3	16	20	13	8
PUSPAGA DISKA	-	-	-	46	43
Laki-laki	-	-	-	3	8
Perempuan	-	-	-	43	35

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, diolah

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase forum anak yang aktif yaitu dengan membandingkan Jumlah forum anak yang aktif dengan jumlah forum anak se kota Pekalongan. Target indikator ini 28,13% realisasi 28,13% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena komitmen stakeholder untuk memberikan kesempatan kepada anak berpartisipasi dalam pembangunan. Tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) forum anak terdiri dari 1 (satu) forum anak Kota, 4(empat) forum anak kecamatan (Kecamatan Barat, Kecamatan Utara, Kecamatan Selatan dan Kecamatan Timur), 4 (empat) Forum Anak Kelurahan (Podosugih, Panjang Wetan, Kuripan Kertoharjo dan Kandang Panjang) dari 32 (tiga puluh dua) forum anak se Kota Pekalongan.

Dalam mewujudkan ketercapaian kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- Sub kegiatan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota, berupa layanan peningkatan kualitas hidup anak sebanyak 386 orang, terdiri dari:
 - ✓ Advokasi Kesejahteraan remaja, sejumlah 51 orang anak;
 - ✓ Festival anak, sejumlah 189 orang anak;
 - ✓ Advokasi Penguatan Kapasitas Forum Anak Kota Pekalongan, sejumlah 56 orang anak;
 - ✓ Pendampingan PUSPAGA, sejumlah 18 orang anak;
 - ✓ Pendampingan PUSPAGA DISKA, sejumlah 43 orang anak;
 - ✓ Pendampingan ATS, sejumlah 29 orang anak.
- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota, berupa:
 - ✓ Sosialisasi Pesantren Ramah Anaksebanyak 1 kali;

- ✓ Rakor APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) sebanyak 1 kali;
 - ✓ Sosialisasi OCSEA (Online Child Sexual Exploitation and Abuse) dan Internet Aman;
 - ✓ Advokasi KLA (Kota Layak Anak) melalui Advokasi KRPPA (Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak) sebanyak 4 kali;
 - ✓ Rakor Kota Layak Anak (KLA) sebanyak 19 kali;
- Sub kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota, berupa:
- ✓ Pelatihan KHA sebanyak 1 kali;
 - ✓ Sosialisasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) sebanyak 1 kali; dan
 - ✓ Sosialisasi Kader Pendamping Ketahanan Keluarga sebanyak 1 kali.

2) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diukur dengan indikator persentase pengaduan kasus anak yang terlayani yaitu dengan membandingkan jumlah pengaduan kasus kekerasan anak yang ditangani/jumlah kasus kekerasan anak yang masuk ke LPPAR. Target indikator ini 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Program ini dapat terealisasi karena komitmen stakeholder untuk memberikan layanan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tahun 2024 terdapat 18 (delapan belas) anak korban kasus kekerasan terdiri dari 7 (tujuh) anak laki-laki dan 11 (sebelas) anak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dapat terlayani di LP PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja).



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah
 Gambar 3. : Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak

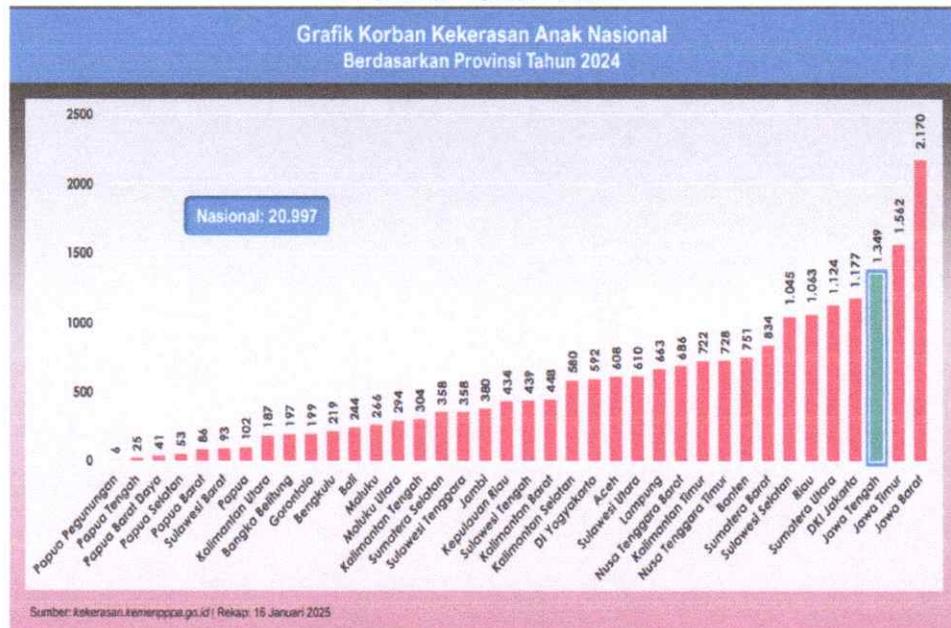
Tabel Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin dan Kategori Usia Korban Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Korban Kekerasan	2.110	2.257	2.207	2.338	2.420
Korban Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin :					
• Laki – laki	436	390	289	469	464
✓ Anak	332	307	245	413	412
✓ Dewasa	104	83	44	56	52
• Perempuan	1.674	1.867	1.918	1.869	1.956
✓ Anak	865	922	979	914	937
✓ Dewasa	809	945	939	955	1.019
Korban Kekerasan berdasarkan Kelompok Umur :					
• Anak	1.197	1.229	1.224	1.327	1.349
• Dewasa	913	1.028	983	1.011	1.071

Sumber: kekerasan.kemempca.go.id | Rekap: 16 Januari 2025

Sumber : <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>

Grafik Korban Kekerasan Perempuan Anak Nasional Berdasarkan Provinsi Tahun 2024



Sumber : <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yaitu dengan membandingkan Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan target kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak. Target indikator ini 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya komitmen stakeholder untuk meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam mewujudkan ketercapaian kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota berupa :

- ✓ Sosialisasi Perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebanyak 1 kali;

b) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome) yaitu dengan membandingkan jumlah anak (penduduk usia < 18th) korban kekerasan yang ditangani dengan jumlah kasus kekerasan pada anak yang masuk ke LPPAR. Target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya komitmen stakeholder untuk memberikan pelayanan maksimal kepada anak yang memerlukan Perlindungan.

Tahun 2024 terdapat 18 (delapan belas) anak korban kekerasan terdiri dari 7 (tujuh) anak laki-laki dan 11 (sebelas) anak perempuan yang

mengalami tindak kekerasan dapat terlayani di LP PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja).

Dalam mewujudkan ketercapaian kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota, didukung oleh sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota, berupa:

- ✓ Kegiatan Case Conference Kasus Anak;
- ✓ Pendampingan kasus kekerasan terhadap anak.

c) Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu dengan membandingkan Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan target kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Target indikator ini 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena komitmen stakeholder meningkatkan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota berupa Pelatihan Manajemen kasus sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 56 orang.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai (Nama Perangkat Daerah) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebesar Rp 6.892.868.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 6.402.183.800,00 atau sebesar 92,88%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp 4.340.521.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.142.461.316,00. atau sebesar 95,44%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.864.179.000	6.892.868.000	6.402.183.800	92,88
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	711.420.000	711.420.000	643.502.762	90,45
I	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	275.000.000	275.000.000	257.036.300	93,47
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	34.221.500	97,78

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	35.000.000	35.000.000	34.221.500	97,78
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	220.000.000	220.000.000	202.814.800	92,19
	2 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	220.000.000	220.000.000	202.814.800	92,19
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00
	3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00
II	Program Perlindungan Perempuan	81.308.000	81.308.000	67.487.862	83,00
4	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	20.000.000	20.000.000	19.302.000	96,51
	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	19.302.000	96,51
5	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	61.308.000	61.308.000	48.185.862	78,60
	5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	61.308.000	61.308.000	48.185.862	78,60

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	ekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
III	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	277.022.000	277.022.000	270.460.900	97,63
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	277.022.000	277.022.000	270.460.900	97,63
	6 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	124.841.000	124.841.000	122.231.000	97,91
	7 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.291.000	113.291.000	111.094.900	98,06
	8 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.890.000	38.890.000	37.135.000	95,49
IV	Program Perlindungan Khusus Anak	78.090.000	78.090.000	48.517.700	62,13
7	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12.300.000	12.300.000	11.650.000	94,72
	9 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/Kota Layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	12.300.000	12.300.000	11.650.000	94,72
8	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.468.000	57.468.000	28.547.000	49,67
	10 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	57.468.000	57.468.000	28.547.000	49,67

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.322.000	8.322.000	8.320.700	99,98
11	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten / Kota	8.322.000	8.322.000	8.320.700	99,98
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.152.759.000	6.181.448.000	5.758.681.038	93,16
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.391.926.000	3.274.204.000	2.934.865.181	89,64
10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.762.000	15.762.000	15.757.800	99,97
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.204.000	2.204.000	2.200.000	99,82
13	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.558.000	1.558.000	1.558.000	100,00
14	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	11.999.800	100,00
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.744.615.000	2.593.541.000	2.301.541.384	88,74
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.421.000	2.552.347.000	2.260.372.484	88,56
16	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.750.000	39.750.000	39.725.000	99,94
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.444.000	1.444.000	1.443.900	99,99
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.601.000	254.953.000	247.139.232	96,94

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.730.000	1.730.000	1.730.000	100,00
	20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.155.000	76.507.000	68.815.000	89,95
	21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,00
	22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.636.000	30.636.000	30.610.000	99,92
	23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00
	24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	2.476.000	99,04
	25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.780.000	134.780.000	134.708.232	99,95
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.948.000	268.948.000	235.300.835	87,49
	26 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	2.100.000	87,50
	27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.200.000	106.200.000	75.283.199	70,89
	28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.348.000	160.348.000	157.917.636	98,48
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.000.000	136.000.000	130.125.930	95,68
	29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.960.000	71.960.000	67.785.000	94,20
	30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	50.000.000	48.400.930	96,80
	31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.040.000	14.040.000	13.940.000	99,29
VI	Program Peningkatan Kerjasama Desa	610.284.000	1.678.947.000	1.642.741.000	97,84
16	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	610.284.000	1.678.947.000	1.642.741.000	97,84

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	32 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	610.284.000	1.678.947.000	1.642.741.000	97,84
VII	Program Administrasi Pemerintahan Desa	48.520.000	56.020.000	54.159.900	96,68
17	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	48.520.000	56.020.000	54.159.900	96,68
	33 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	48.520.000	56.020.000	54.159.900	96,68
VIII	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.102.029.000	1.172.277.000	1.126.914.957	96,13
18	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.102.029.000	1.172.277.000	1.126.914.957	96,13
	34 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	177.827.000	175.043.000	165.809.632	94,73
	35 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	327.136.000	337.136.000	327.522.862	97,15
	36 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	75.000.000	67.500.000	53.113.000	78,69

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	
				Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	37 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	52.500.000	46.932.000	46.856.000	99,84
	38 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	469.566.000	545.666.000	533.613.463	97,79
	Jumlah	5.864.179.000	6.892.868.000	6.402.183.800	92,88

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan telah diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, antara lain berupa :

- Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada tahun 2023;
- Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Nindya oleh Kementerian PPPPA RI pada tahun 2023;
- Juara 2 (dua) Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kategori Lomba TTG Unggulan berupa alat Mesin Pembatikan Otomatis dengan inventor M. Suropto Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat pada tahun 2024;
- Juara 4 (empat) Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Timur pada tahun 2024.

3.5 INOVASI

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan melakukan inovasi “Sahabat Perempuan dan Peduli Anak (SAPA)”. SAPA merupakan inisiatif yang bertujuan salah satu fokus utamanya adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pola asuh yang baik, serta melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, mental, dan seksual. Selain itu, program ini juga memberdayakan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

BAB IV PENUTUP

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023/24 yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa rata-rata capaian 4 (empat) indikator (102,36) dikategorikan "**Sangat Berhasil**". Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan segala upaya yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan telah EFEKTIF dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada aspek akuntabilitas keuangan, penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mencapai 92,88% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Tidak terserapnya anggaran yang sebesar 7,12% tersebut merupakan hasil EFISIENSI anggaran mengingat seluruh kinerja impact dan outcome telah tercapai dan hampir seluruh kinerja output telah tercapai.

Pencapaian target kinerja tersebut merupakan hasil dari upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi dari tahun sebelumnya. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Advokasi PUG dan penguatan Sahabat Perempuan dan Peduli Anak (SAPA);
2. Kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, sebagai berikut:
 - Bintek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

- Kegiatan Desk penyusunan dokumen GAP (*Gender Analysis Pathway*) GBS (*Gender Budget Statemen*),
 - Monev Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - FGD (*Focus Group Discussion*) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
3. Meningkatkan sinergitas dan optimalisasi peran OPD terkait dalam upaya peningkatan sumbangan pendapatan perempuan yang menjadi salah satu indikator komposit IDG dan mejadi target kinerja, dengan kegiatan:
- Pelatihan pemberdayaan perempuan terhadap organisasi perempuan;
 - Sosialisasi pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak dengan organisasi perempuan;
4. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi kegiatan antar OPD dan stakeholder terkait pemenuhan hak anak, sebagai berikut:
- Pendampingan PUSPAGA "ELPePar" (Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli Partisipasi");
 - Pelatihan FA (Forum Anak);
 - Advokasi kesejateraan remaja terintegerasi;
 - Sosialisasi kader pendamping ketahanan keluarga;
 - Sosialisasi perilaku social menyimpang;
 - Sosialisasi OCSEA dan internet aman bagi anak;
 - Advokasi KRPPA;
 - Sosialialisasi Pesantren Ramah Anak (PRA) dan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA);
 - Rakor KRA (Kelurahan Ramah Anak)
 - Rakor PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan PUSPAGA "ELPePar";
 - Festival anak dalam rangka HAN (Hari Anak Nasional);
 - FGD (Focus Group Discussion) Pengembangan satuan pendidikan ramah anak.
5. Mengoptimalkan gugus tugas Kota Layak Anak, sebagai berikut:
- Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak);
 - Pelatihan Manajemen kasus;

- Rakor KLA (Kota Layak Anak).
6. Telah dilakukan koordinasi dan sinergi dengan OPD teknis terkait perencanaan dan penganggaran dana kelurahan agar tepat sasaran dan sesuai dengan maksud dan tujuan program dana kelurahan yaitu memberdayakan masyarakat kelurahan;
 7. Membuat poster/fliyer dalam bentuk stiker Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan menyebarkannya ke kelurahan dan kecamatan se Kota Pekalongan untuk ditempel di papan informasi kelurahan;
 8. Telah dilaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan dana kelurahan secara berkala;
 9. Melakukan Identifikasi potensi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kelurahan, sebagai berikut:
 - Merumuskan kisi-kisi potensi swadaya masyarakat yang dapat dihimpun atas pelaksanaan dana kelurahan baik fisik maupun non fisik;
 - Melakukan sosialisasi rumusan kisi-kisi swadaya masyarakat kepada Fasilitator pemberdayaan masyarakat Kota Pekalongan sebagai bahan identifikasi potensi swadaya masyarakat atas pelaksanaan dana kelurahan
 10. Telah membuat usulan ke BKPSDM Kota Pekalongan tentang kebutuhan formasi pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai.

Dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2024 muncul beberapa permasalahan/hambatan. Meskipun begitu beberapa permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif masih tetap diperlukan atas segala kemungkinan masalah/hambatan yang mungkin timbul dimasa datang, sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Beberapa langkah antisipatif dan koreksi dapat ditempuh dimasa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pengarusutamaan Gender melalui advokasi PUG dengan sasaran yang lebih luas khususnya tokoh agama/tokoh masyarakat;
2. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender menjadi salah satu upaya untuk optimalisasi pengarusutamaan gender;

3. Meningkatkan sinergitas dan optimalisasi peran OPD terkait dalam upaya peningkatan sumbangan pendapatan perempuan yang menjadi salah satu indikator komposit IDG dan mejadi target kinerja;
4. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi kegiatan antar OPD dan stakeholder terkait pemenuhan hak anak;
5. Mengoptimalkan gugus tugas Kota Layak Anak;
6. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan OPD teknis terkait perencanaan dan penganggaran dana kelurahan agar tepat sasaran dan sesuai dengan maksud dan tujuan program dana kelurahan yaitu memberdayakan masyarakat kelurahan;
7. Melakukan sosialisasi lebih intensif kepada stakeholder terkait pada kegiatan dana kelurahan agar memprioritaskan pelaksanaannya secara swakelola oleh kelompok masyarakat/LKK;
8. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dana kelurahan secara berkala;
9. Melakukan Identifikasi potensi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kelurahan
10. Pemenuhan kebutuhan formasi pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada tahun kedepan.

Pekalongan, 20 Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan



PUJI WINARTI, SKM, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP 19700502 199501 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	78,63	80,50	82,00	83,50	83,35	83,45	83,55	Inspektorat Daerah	DPMPPA
2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	Anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dibagi Dana Kelurahan (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dikali 100	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	7,14	7,61	8,08	8,55	9,02	9,49	10,00	Kelurahan	DPMPPA
3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Tahun N yang dilakukan oleh BPS	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	28,50	28,50	28,51	28,51	28,56	28,56	28,56	BPS	DPMPPA
4	Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Skor	Skor Kota Layak Anak Tahun N yang dilakukan oleh KPPA RI	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	602,00	626,00	628,00	630,00	769,80	769,90	769,90	KPPA RI	DPMPPA

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekalongan



PUJI WINARTI S.K.M., M.Kes

NIP. 19700502 199501 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.**

Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 9 Desember 2024

Pihak Kedua,

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

Kepala DPMPPA



PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.

NIP. 19700502 199501 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,45 indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31 indeks	Formulasi : Release dari BPS Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS
3.	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Formulasi : Kategori penghargaan hasil evaluasi Kab/Kota Layak Anak pada tahun n yang diberikan oleh Kementerian PPPA RI Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kementerian PPPA RI
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83,35 indeks	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	9,02 persen	Formulasi : (Anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dibagi Dana kelurahan (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan) x 100 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPMPPA

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
3.	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	28,56 indeks	Formulasi : Persentase sumbangan pendapatan perempuan pada tahun n (hasil rilis BPS) Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : BPS
4.	Meningkatnya Skor Kota Layak anak	Skor Kota Layak Anak	769,8 skor	Formulasi : Skor KLA hasil evaluasi Kementerian PPPA RI Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : Kementerian PPPA RI

	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.274.204.000,00	APBD-P
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	1.678.947.000,00	APBD-P
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	56.020.000,00	APBD-P
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.172.277.000,00	APBD-P
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	275.000.000,00	APBD-P
6	Program Perlindungan Perempuan	Rp	81.308.000,00	APBD-P
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	277.022.000,00	APBD-P

7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	277.022.000,00	APBD-P
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	78.090.000,00	APBD-P
	Jumlah	Rp	6.892.868.000,00	

Pekalongan, 9 Desember 2024



Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E. MM.



Kepala DPMPPA

PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.

NIP. 19700502 199501 2 001